LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT BPR DAYA PERDANA NUSANTARA TAHUN 2021

BANK PERDANA
BPR DAYA PERDANA NUSANTARA

JL RAYA BOGOR KM 29 CIMANGGIS DEPOK
TELEPON: 0218720479

BAB I
PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Daya Perdana Nusantara pada tahun 2021 telah membawa perkembangan yang positif meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

PT. BPR Daya Perdana Nusantara memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT. BPR Daya Perdana Nusantara dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Depok. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT. BPR Daya Perdana Nusantara didukung oleh integritas melalui proses intern yang melibatkan seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan PT. BPR Daya Perdana Nusantara.

Di sepanjang 2021 dan untuk di tahun-tahun mendatang PT. BPR Daya Perdana Nusantara terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

PT BPR DAYA PERDANA NUSANTARA
JL RAYA BOGOR KM 29 CIMANGGIS DEPOK
Telepon: 0218720479
Website: www.bprperdana.com. Email: bpr_perdana@yahoo.co.id

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Ricardo Simatupang
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi syarat seluruh POJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdaapt kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari POJK dan/ atau peraturan perundang-undangan lain. b. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain. c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan POJK. d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan Peraturan Perundang- undangan lain yang relevan. e. Melaporkan kepada angota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR. f. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.		
2.	Nama	:	Hermono Fauzi
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat. c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin			

dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR Daya Perdana Nusantara. d. Monitor secara rutin debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan. e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2021. f. Temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing. g. Inovasi proses kredit secara digital telah diimplementasikan.
Penjelasan Lebih Lanjut :
nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Hasahatan Gultom
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temaun audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.		
2.	Nama	:	Halompoan Rony Manurung
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temaun audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		

Rekomendasi Kepada Direksi :
a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat. c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan

reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR Daya Perdana Nusantara. d. Memonitor secara rutin debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat. e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2021. f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan. g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja bisnis.
Penjelasan Lebih Lanjut :
nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	:	nihil

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit

	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ricardo Simatupang		Rp0,00	0%
2.	Hermono Fauzi		Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi pada PT BPR Daya Perdana Nusantara tidak memiliki saham				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ricardo Simatupang		601873	PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 18	3.97%
2.	Ricardo Simatupang	[redacted]	601874	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 15	12.33%
3.	Ricardo Simatupang		601963	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 1	0.7%
4.	Ricardo Simatupang	[redacted]	601964	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 3	3.46%
5.	Ricardo Simatupang		601956	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8	5.49%
6.	Ricardo Simatupang		600018	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25	2.51%
7.	Ricardo Simatupang		602048	PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27	0.9%
8.	Ricardo Simatupang	[redacted]	600149	PT BPR Nusantara Bona Pasogit 33	8.04%
9.	Ricardo Simatupang		600013	PT. BPR Bumiasih NBP 24 d/ h Onang Hasang	5.01%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Salah satu anggota direksi memiliki saham pada perusahaan lain dimana seluruh perusahaan tersebut merupakan bank yang terdaftar di OJK					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ricardo Simatupang		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Hermono Fauzi		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
nihil					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ricardo Simatupang		Tidak ada	Tidak ada	Yenita Elza - Istri, Rezwani Simatupang - Adik
2.	Hermono Fauzi		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Salah satu anggota direksi memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Hasahatan Gultom		Rp280.582.000,00	5%
2.	Halompoan Rony Manurung		Rp693.039.000,00	12%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
seluruh dewan komisaris memiliki saham di PT BPR Daya Perdana Nusantara.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Hasahatan Gultom		601874	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 15	4.25%
2.	Hasahatan Gultom		600140	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 34	0.57%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris Utama memiliki saham pada perusahaan lain dimana seluruh perusahaan tersebut merupakan bank yang terdaftar di OJK					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Hasahatan Gultom		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Halompoan Rony Manurung		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
nihil					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Hasahatan Gultom		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Halompoan Rony Manurung		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
nihil					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp576.000.000,00	2	Rp221.700.000,00
2.	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp576.000.000,00		Rp221.700.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi dan Dewan komisaris memiliki paket remunerasi berupa gaji					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (2), Inhealth (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tunjangan BBM (2)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tunjangan BBM yang diberikan kepada Direksi menggunakan sistem reimbursement.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.89 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.18 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.26 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.48 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.73 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	18 Januari 2021	2	Laporan triwulan IV tahun 2020
2.	15 April 2021	2	Laporan triwulan I tahun 2021
3.	21 Juli 2021	2	Laporan triwulan II tahun 2021
4.	19 Oktober 2021	2	Laporan triwulan III tahun 2021
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pada tahun 2021 Dewan komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali pertemuan dengan pembahasan laporan triwulan selama 4 periode dan selain itu dewan komisaris juga melakukan rapat dengan direksi serta Pejabat Eksekutif sebanyak 11 (sebelas) kali pertemuan yang sebagian besar membahas perihal Penyaluran Kredit, Penanganan Kredit Bermasalah, Strategi dalam mencapai RBB, Strategi dalam menurunkan PAR & NPL, Evaluasi Kredit Wanita Mandiri, Maka dari total keseluruhan rapat selama tahun 2021 adalah 15 pertemuan.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Hasahatan Gultom		4	0	100%
2.	Halompoan Rony Manurung		4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Persentase kehadiran dewan komisaris dalam menghadiri rapat adlah 100%. Dewan komisaris selalu hadir secara langsung dalam melaksanakan Rapat Dewan Komisaris di tahun 2021					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	1
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	1
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2021 terdapat 2 fraud yang dilakukan oleh AO an Pranoto dimana ybs sudah tidak menjadi karyawan di PT BPR Daya Perdana Nusantara pada saat ditemukannya tindakan faurd (Desember 2021) lalu tim audit intern menindaklanjuti hasil temuan tersebut dan telah diselesaikan pada Januari 2022. Selain itu telah ditemukannya tindakan Fraud yang dilakukan oleh AO an Hanny Hapita pada (Desember 2021) dan telah diselesaikan pada Januari 2022.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Terdapat 2 (dua) permasalahan hukum debitur an PT Ekalaya Saputra dan an Martono yang belum terselesaikan sampai dengan 31 Desember 2021. Kedua debitur tersebut merupakan kredit sindikasi dengan BPR lain dan PT BPR Daya Perdana Nusantara sebagai anggota dari kredit sindikasi tersebut.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
PT BPR Daya Perdana Nusantara memiliki perjanjian sewa tanah dan bangunan milik Ibu Yenita Elza (Isteri dari Direktur Utama PT BPR Daya Perdana Nusantara sekaligus PSP di PT BPR Daya Perdana Nusantara). Perjanjian sewa tersebut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai 26 Desember 2019 s.d 26 Desember 2024 dengan nilai transaksi Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Hal tersebut tidak mengandung benturan kepentingan karena harga sewa yang telah disepakati sesuai dengan hasil survey/ pengecekan harga sewa dilingkungan tersebut. Jadi kesepakatan harga diperoleh setelah dilakukan pengecekan / survey harga sewa dilingkungan sekitar wilayah tersebut serta kondisi bangunan sudah sesuai dengan standar keamanan Bank sebelum dilakukannya perjanjian sewa.									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	13 April 2021	Sosial	Sumbangan dalam kegiatan keagamaan	GPIB Anguerah Bekasi	Rp2.500.000,00
2.	14 Desember 2021	Sosial	Renovasi Mushola RT yang lokasinya terletak dilingkungan kantor	Mushola RT 02 RW 01	Rp500.000,00

			tepatnya dibelakang kantor BPR Daya Perdana Nusantara		
3.	09 Desember 2021	Sosial	Sumbangan bencana alam gunung semeru	Warga Sekitar Gunung Semeru	Rp2.000.000,00
4.	02 Juli 2021	Politik	Sumbangan 2 buah karangan bunga untuk HUT Bhayangkara	Bhayangkara	Rp1.000.000,00
5.	19 Juli 2021	Sosial	Pembelian hewan qurban	Warga Sekitar lingkungan Kantor Pusat dan Cabang	Rp12.300.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
selain data yang sudah disampaikan tersebut, terdapat beberapa biaya rutin yang dikeluarkan setiap bulan terkait Iuran bulanan lingkungan, Iuran Sampah, Sumbangan Anak Yatim dengan total keseluruhan biaya Rp 5.205.000.					

Depok, 27 April 2022

PT BPR DAYA PERDANA NUSANTARA

Menyetujui

BANK PERDANA
PT BPR DAYA PERDANA NUSANTARA

Ricardo Simatupang
Direktur Utama

Hasahatan Gultom
Komisaris Utama

BANK PERDANA
BPR DAYA PERDANA NUSANTARA

PT BPR DAYA PERDANA NUSANTARA
JL RAYA BOGOR KM 29 CIMANGGIS DEPOK
Telepon: 0218720479
Website: www.bprperdana.com. Email: bpr_perdana@yahoo.co.id

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	:	PT BPR DAYA PERDANA NUSANTARA
Alamat	:	JL RAYA BOGOR KM 29 CIMANGGIS DEPOK
Nomor Telepon	:	0218720479
Posisi Laporan	:	Desember 2021
Modal Inti	:	Rp6.803.224.828,00
Total Aset	:	Rp46.400.242.041,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR DAYA PERDANA NUSANTARA Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

a. Nilai komposit GCG sebesar 1.7 dengan predikat Sangat Baik (1)
b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.29	0.258
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.47	0.221
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.90	0.190
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.28	0.228
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.25	0.031
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.95	0.195
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.00	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	2.04	0.153
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.90	0.143
Nilai Komposit			**1.700**
Predikat Komposit			**Sangat Baik**

Scanned with CamScanner

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.29)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Daya Perdana Nusantara terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama yang juga membawahkan fungsi kepatuhan dan Direktur.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.47)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Daya Perdana Nusantara sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.9)

PT BPR Daya Perdana Nusantara telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.28)

Tim Audit Intern yang saat ini terdiri dari 1 (satu) orang staf Internal Audit telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.25)

PT BPR Daya Perdana Nusantara telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.95)

PT BPR Daya Perdana Nusantara telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

Scanned with CamScanner

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR Daya Perdana Nusantara telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. PT BPR Daya Perdana Nusantara dalam menjalankan Operasional selalu berhati- hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.04)

Rencana Bisnis Bank BPR Daya Perdana Nusantara telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.9)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR Daya Perdana Nusantara telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR Daya Perdana Nusantara juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT BPR Daya Perdana Nusantara masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2021 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.

Scanned with CamScanner

PT BPR DAYA PERDANA NUSANTARA
JL RAYA BOGOR KM 29 CIMANGGIS DEPOK
Telepon: 0218720479
Website: www.bprperdana.com. Email: bpr_perdana@yahoo.co.id

Depok, 27 April 2022

PT BPR DAYA PERDANA NUSANTARA

Menyetujui

BANK PERDANA
PT BPR DAYA PERDANA NUSANTARA

Ricardo Simatupang	Hasahatan Gultom
Direktur Utama	Komisaris Utama

Scanned with CamScanner